

## GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT)

MUHAMMAD IRWAN

Fak. Ekonomi UNRAM

### ABSTRAKSI

Penyandang masalah kesejahteraan sosial diantaranya Gelandangan dan Pengemis semakin menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, sehingga diikhtiarkan untuk ditangani termasuk di Nusa Tenggara Barat. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif mengenai Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dari Perspektif Ekonomi Islam yang dikaitkan dengan kondisi riil yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Data yang dipergunakan sepenuhnya data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi terkait.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyandang masalah kesejahteraan social di NTB mengalami penurunan namun ada beberapa jenis yang mengalami peningkatan dari tahun 2008 – 20011. Jumlah Gelandangan dan Pengemis mengalami peningkatan dari tahun 2008 berjumlah 1.061 orang menjadi 1.614 orang pada tahun 2011 dengan rincian jumlah gelandangan pada tahun 2008 sebanyak 558 orang menjadi 1.275 orang pada tahun 2011, sedangkan kemiskinan pada tahun 2008 sebanyak 429 orang turun menjadi 339 orang pada tahun 2011, sehingga dalam kurun waktu tersebut jumlah gelandangan mengalami peningkatan.

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan harta melalui distribusi harta, sehingga orang yang melakukan meminta - minta sangat dikecam bahkan akan mendapat kehinaan di hari kiamat. Islam hanya membolehkan kepada 3 golongan untuk meminta-minta yaitu orang miskin, orang yang dililit hutang besar dan orang yang dibebani tebusan yang besar.

---

*Kata kunci : Gelandangan dan pengemis, perspektif Ekonomi Islam*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Kesejahteraan (sejahtera) merupakan adalah harapan yang hendak dituju baik dalam kontek kelembagaan, kelompok maupun individual, karena kondisi ini merupakan suatu kondisi yang menghantarkan lembaga, kelompok atau individu berada pada taraf yang ideal, segala kebutuhan material maupun spiritual telah dapat diwujudkan. Namun, kondisi ideal tersebut hingga kini belum mampu digapai bahkan dirasakan semakin jauh terutama bagi individu atau kelompok yang termarginalkan bahkan yang mampu sekalipun. Hal ini didasari karena bervariatifnya dimensi dan indikator dari kesejahteraan tersebut yang terkadang pada satu indikator lembaga, kelompok atau individu telah dikatakan sejahtera, namun belum sejahtera bagi lembaga, kelompok atau individu lainnya.

Pencapaian kondisi kesejahteraan dalam kontek ekonomi maupun sosial hingga saat ini terus diikhtiarkan oleh pemerintah, dan telah menunjukkan hasil yang positif yang dibuktikan dengan semakin berkurangnya penduduk yang tergolong miskin, terbukanya kesempatan kerja atau terjadinya penurunan jumlah penganggur terbuka, dan meningkatnya kualitas SDM yang ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi sekolah baik pada level pendidikan dasar, menengah bahkan pendidikan tinggi. Kendati demikian, ikhtiar terus dilakukan karena seiring dengan terjadinya siklus perekonomian yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian, akan membuyarkan hasil yang telah dicapai dengan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan selama bertahun – tahun. Imbas dari belum tercapainya kesejahteraan ekonomi secara merata dan menyeluruh merambah pada kesejahteraan sosial yang semakin menjauh dari komunitas masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin berfluktuatifnya jumlah penduduk yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual maupun sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU Kesejahteraan Sosial dalam Huda, 2009; 73). Kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk memecahkan permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai faktor diantaranya kemiskinan ( material dan spritual). Konsep tersebut terarah kepada masyarakat yang tergolong dalam penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) yang didefinisikan dengan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana social (Kemensos, RI, 2011).

Penyandang masalah kesejahteraan di Indonesia hingga saat ini digolongkan ke dalam 22 jenis, 2 diantaranya adalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang sejak dulu hingga sekarang tetap menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan turunan yang ditimbulkan terutama sekali berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan makhluk lainnya.

Keberadaan Gelandangan dan Pengemis akhir – akhir ini semakin meresahkan masyarakat terutama sekali di daerah – daerah perkotaan. Hampir setiap hari kita melihat di persimpangan jalan, di emperan toko, di pasar-pasar, terminal- terminal, stasiun kereta api, di instansi – instansi pemerintah maupun swasta hilir mudik manusia golongan ini menghiba kepada manusia lain yang dianggap lebih baik kedudukan dari mereka untuk memberikan sekedar kelebihan yang dimiliki guna memenuhi harapan dan permintaannya. Fenomena ini untuk masa sekarang tidak lagi melihat golongan umur, mulai anak-anak hingga orang tua, laki atau perempuan, berpendidikan rendah atau tinggi sengaja atau tidak sengaja masuk dalam katagori Gepeng demikian istilah yang ditujukan kepada mereka. Betapa tidak, hanya bermodalkan wajah memelas, kata-kata yang mengundang simpati, berpakaian tidak pantas bahkan berperan sebagai penyandang cacat, pengumpul dana atas nama pembangunan rumah ibadah maupun yayasan dengan berbagai variasinya, mereka dapat mengumpulkan hasil kerjanya dalam jumlah yang relative banyak dan bila dikalkulasikan dalam sebulan akan menyamai atau lebih besar dari penghasilan Pegawai Negeri. Akibatnya kegiatan ini dijadikan profesi dengan tidak lagi melihat aspek normatifnya. Anak – anak dijadikan sasaran utama sebagai pelakunya, padahal pada usia tersebut mereka harus berada di bangku sekolah ( negeri maupun swasta, informal ) untuk memiliki ilmu pengetahuan untuk masa depannya. Rasa malu dan harga diri dikorbankan demi menggapai tujuan pemenuhan kebutuhan yang dikatakan oleh sistem ekonomi kapitalis jumlahnya yang tidak terbatas. Akhirnya harga diri dan rasa malu dibuang jauh-jauh, pemaksaan kehendak ditampakkan, sikap pasrah dan mengharapkan belas kasih dari orang lain semakin meningkat serta timbulnya rasa malas untuk berkreasi dan bekerja.

Ekonomi Islam yang berpijak pada Al-Qur'an dan Al-Hadist maupun Ijithad, menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat, istimewa, mulia dan merupakan subyek sekaligus pelaku seluruh aktivitas kehidupan di dunia ini, terlebih aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi baik sebagai konsumen maupun produsen pada intinya mengutamakan pemenuhan kepentingan individu dengan tidak melupakan pemenuhan kebutuhan individu lainnya (social). Segala hasil yang diperoleh dapat dimiliki secara individu, dan sebagian dari kepemilikan tersebut ada hak orang lain yang diwujudkan dalam distribusi harta baik wajib maupun sunah. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu dan ada golongan lain yang tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memiliki harta tersebut. Maka kewajiban yang memiliki harta banyak (kaya) untuk memperhatikan saudaranya yang lain agar tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan akhirnya mereka menjadi gelandangan maupun pengemis.

Penekanan ekonomi Islam terhadap masalah ini adalah untuk menghindarkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam kepemilikan harta serta mengajarkan manusia untuk memiliki rasa kesetiakawanan dan solidaritas social sehingga tujuan mengangkat harkat dan martabat manusia melalui kesejahteraan ekonomi maupun social dapat terwujud. Pada sisi lain, agar manusia yang tidak punya bisa mengembangkan dirinya dan tidak hanya duduk berpangku tangan ( menganggur) yang hanya menunggu datangnya pemberian dari orang lain.

Fenomena gelandangan dan kemiskinan (Gepeng) tidak hanya fenomena nasional juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Pemandangan umum terlihat bahwa Gepeng berada di mana-mana dan kemungkinan jumlahnya semakin bertambah, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif mengenai Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dari Perspektif Ekonomi Islam yang dikaitkan dengan kondisi riil yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Harapannya, dapat dijadikan informasi tambahan bagi pegiat masalah kesejahteraan ekonomi dan social baik pemerintah maupun stakeholders lainnya, khususnya masalah Gelandangan dan Pengemis agar dapat dijadikan landasan kebijakan sehingga dapat dituntaskan secara berkesinambungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan kondisi gelandangan dan pengemis yang berada di Nusa Tenggara Barat sekaligus menggambarkan penyandang masalah kesejahteraan social. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data tentang penyandang masalah kesejahteraan social di NTB tahun 2008 – 2011 yang bersumber dari Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang dikeluarkan oleh BPS NTB serta dari berbagai media baik cetak maupun elektronik. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan pada data kuantitatif. Selain itu analisis ini mengacu pada berbagai literature yang berkaitan erat dengan masalah yang dianalisis.

## PEMBAHASAN

### Dinamika Gelandangan dan Pengemis

Menurut Kementerian Sosial (2011) “Gelandangan” adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di tempat tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan “Pengemis” adalah orang – orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Perkembangan jumlah Gelandangan dan Pengemis secara nasional berfluktuatif sebagaimana terlihat dalam table berikut.

Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Indonesia Tahun 2008 – 2011

No	Jenis PMKS	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Gelandangan ( orang)	25.169	55.433	25.662	18.599
2	Pengemis (orang)	35.057	33.323	175.438	178.262
	Jumlah	60.226	88.756	201.100	196.861

Sumber : Kementerian Sosial RI, 2012.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah gelandangan terus mengalami penurunan yang signifikan, sementara jumlah pengemis mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun secara total jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) mengalami penurunan pada tahun 2011 meskipun masih lebih besar dibanding tahun 2009. Penurunan jumlah gelandangan tidak terlepas dari upaya keras pemerintah maupun pihak-pihak pemerhati masalah gelandangan agar permasalahan ini dapat dikurangi karena akan membawa dampak terhadap terhadap stabilitas social terutama di daerah perkotaan. Sementara pengemis, mengalami fluktuatif yang cukup tinggi karena golongan ini sulit diperkirakan perubahannya, terlebih pada waktu – waktu tertentu seperti perayaan hari keagamaan akan mengundang munculnya pengemis musiman, terlebih pada bulan puasa dan lebaran.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2008 -2011 mengalami dinamika yang berfluktuatif. Pada tahun 2008 berjumlah 1.314.268, meningkat menjadi 1.518.064 dan pada tahun 2011 turun menjadi 1.306.208. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh faktor internal manusia maupun faktor eksternalnya. Berbagai permasalahan yang ada didominasi oleh faktor internal yang dipengaruhi terutama berkaitan dengan kestabilan karakter maupun sifat manusia yang terkadang tidak dapat dikendalikan. Faktor emosional didorong oleh hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan memicu timbulnya berbagai permasalahan yang berdampak pada masalah internal keluarga bahkan merambah kepada lingkungan yang lebih luas. Kekuatan dan kestabilan iman juga turut mendorong hawa nafsu untuk melakukan hal-hal di luar norma dan etika serta kurangnya dukungan pihak keluarga menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran yang terkadang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pada sisi lain, himpitan ekonomi yang semakin terdesak, menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, pekerjaan dan kesempatan kerja terbatas, akses untuk mengembangkan diri yang tertutup terutama berkaitan dengan aktivitas ekonomi, daya dukung lingkungan yang tidak ada sama sekali serta menipishnya rasa tenggang rasa dan kepedulian dari pihak lain semakin memberikan peluang untuk melakukan

hal – hal yang mengarah pada instabilitas social. Sementara faktor eksternal yang memang di luar batas kemampuan seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan lainnya akan menambah derita yang berkepanjangan sehingga semakin menambah manusia yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan social. Gambaran penyandang masalah kesejahteraan social di Nusa Tenggara Barat terlihat dalam tabek berikut.

Tabel 2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2011

No	Jenis	2008	2009	2010- 2011
1	Anak Balita Terlantar (Jiwa)	25.888	25.785	22.023
2	Anak Terlantar (jiwa)	212.793	200.630	201.699
3	Anak Nakal	13.820	15.610	15.799
4	Anak Jalanan (jiwa)	11.632	10.181	10.005
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (jiwa)	72.890	75.864	74.684
6	Korban Tindak Kekerasan	14.000	72.060	24.068
7	Lanjut Usia Terlantar (jiwa)	72.844	70.314	76.629
8	Penyandang cacat (jiwa)	38.077	397.569	161.147
9	Tuna Susila (jiwa)	394	446	440
10	Pengemis (Jiwa)	428	558	339
11	Gelandangan (jiwa)	633	651	1.275
12	BWBLK (jiwa)	5.372	4.166	4.896
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA (jiwa)	3.031	2.238	1.530
14	Keluarga fakir miskin (KK)	320.233	45.1353	434.893
15	Keluarga Berumah Tidak layak huni	152.060	117.492	178.904
16	Keluarga bermasalah sosial psikologis	23.224	5.713	25.373
17	Komoditas Adat Terpencil (KK)	9.497	8.938	6.432
18	Korban Bencana Alam (KK)	37.438	19.230	25.845
19	Korban Bencana Sosial/ Pengungsi (KK)	11.176	10.625	9.535
20	Pekerja Migran bermasalah sosial (jiwa)	4.880	3.681	4.354
21	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (jiwa)	12	3	3
22	Keluarga Rentan (KK)	284.246	24.957	26.335
	Jumlah	1.314.568	1.518.064	1.306.208

Sumber :BPS, NTB Dalam Angka 2011 - 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2011 mengalami penurunan di banding tahun 2009 sebesar -9,19 persen, dan sebesar – 0,64 persen dibanding tahun 2008, namun terdapat beberapa jenis yang mengalami peningkatan. Dari gambaran data di atas, tampaknya masalah kesejahteraan social masih menjadi agenda utama yang tetap dijalankan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masalah kesejahteraan social memang tidak dapat dilepaskan dari permasalahan mendasar yaitu permasalahan ekonomi misalnya fakir miskin dan rawan social ekonomi yang membawa dampak luas terhadap timbulnya masalah social ( anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis) dan juga kondisi fisik rumah tempat tinggal mereka. Akibat lanjutannya adalah tercipta ketidak stabilan social diantaranya timbul kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut Usman (2012) dalam perspektif sosiologi, kekerasan merupakan perilaku social yang menjadi produk dan stimulant perilaku – perilaku seseorang terhadap orang lain. Kekerasan merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat sedang “sakit” dimana faktor *non adaptive* lebih berkembang dari pada faktor *adaptive*. Dalam kondisi demikian masyarakat dilanda krisis nilai dan norma social yang sejak lama disosialisasikan tidak lagi dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan interaksi social. Di samping itu norma social tidak mampu mengendalikan arah perilaku anggota masyarakat karena ada kekecewaan berat baik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, politik maupun cultural, tidak terpenuhi. Meskipun data pada table di atas menunjukkan

bahwa tindak kekerasan mengalami penurunan, namun gejala ini terus diwaspadai, mengingat akhir – akhir ini muncul berbagai peristiwa kekerasan dengan bentuk yang beraneka dan hanya dipicu hal- hal yang sederhana. Jika hal ini terus terjadi, maka pengentasan penduduk penyandang masalah kesejahteraan social dan pencapaian kesejahteraan sulit diwujudkan.

Berkaitan dengan hal ini, ekonomi Islam melihat aspek utama yang dikedepankan dan diperhatikan untuk mewujudkan kestabilan social sekaligus kesejahteraan social berpulang pada aspek sumberdaya manusia (SDM). Kita mengkhawatirkan bahwa hingga saat ini kualitas SDM masih sangat rendah dilihat dari berbagai indikator, sehingga sehingga berpeluang sekaligus berpotensi untuk menimbulkan instabilitas. Salah satu lokomotif pembentuk SDM berkualitas adalah bersumber dari lembaga mikro yang bernama keluarga. Menurut Chapra (2010), keluarga tidak akan mampu menjalankan peran mereka; *pertama*, jika orang tua tidak memiliki kualitas pribadi yang memungkinkannya untuk mendidik anak-anaknya, dan *kedua* jika dalam sebuah keluarga tidak terdapat nuansa cinta dan perhatian, saling peduli dan menyayangi. Jika dalam lingkup mikro sudah terdapat gejala demikian, maka dalam lingkup yang luas (masyarakat) akan sulit tercipta masyarakat ideal yang diharapkan. Masyarakat ideal yang dimaksudkan adalah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya selalu dilandasi oleh nilai – nilai normative baik yang bersumber dari ajaran agama yang dianut maupun yang tercipta berdasarkan tradisi maupun kebiasaan. Menurut Kaelany (2005), masyarakat ideal yang diciptakan islam adalah masyarakat Mardhatillah karena masyarakat tersebut terbangun dan terbina oleh dan dalam struktur yang berpolakan hukum-hukum Allah dengan sumbernya Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Aktivitas ekonomi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tidak dapat terlepas dari aturan normative yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist maupun Ijtihad. Prinsip utama yang dikedepankan ekonomi Islam adalah tercapainya *falah* yaitu kebahagiaan umat manusia dilihat dari spiritual, moral dan social ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Sistem ekonomi islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan social (Chaudry, 2012).

Berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan social di atas dikaitkan dengan tujuan dari ekonomi Islam, mengindikasikan bahwa tujuan tersebut masih jauh dari harapan, karena kebahagiaan yang dituju tidak dapat digapai bahkan semakin jauh, justru kesengsaraan, kenestapaan dan penderitaan yang sering bersahabat, keadilan distribusi masih jauh dari kenyataan justru yang muncul adalah penumpukan harta dan sikap individualisme. Sikap individualisme merupakan sikap yang dihasilkan oleh sistem ekonomi konvensional kapitalis, yang tidak mengenal adanya distribusi harta untuk pihak lain, justru orang dianjurkan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Buah karya dari sistem ini, semakin kita rasakan bahkan dengan jargon globalisasi sistem ekonomi konvensional kapitalis telah membuat kita terlena dengan segala strateginya. Menurut Fakih (2011) proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi dan proses produksi dari perusahaan – perusahaan transnasional yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. Atas dasar ini perekonomian global telah menimbulkan berbagai permasalahan baru bahkan krisis – demi krisis datang silih berganti dan titik akhirnya membuat orang semakin jauh dari kesejahteraan dan menambah penyandang masalah kesejahteraan social.

Dari 22 jenis permasalahan social di atas, yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun NTB adalah Pengemis dan Gelandangan. Dalam kacamata ilmu ekonomi baik ekonomi konvensional terlebih ekonomi Islam masalah ini menjadi topic analisis dan kajian bahkan dijadikan sebagai sasaran utama dari tujuan pembangunan yaitu tercapai kesejahteraan hakiki sebagai manifestasi dari fungsi dan kedudukan manusia yang terhormat dan istimewa di muka bumi ini. Pengemis dan gelandangan terutama yang dilakukan oleh anak-anak akan membawa dampak negative bagi keberlanjutan kehidupannya di masa depan. Karena tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, serta terbiasa dengan meminta – minta menjadikan mereka menjadi generasi yang lemah, generasi yang hanya mengharapkan belas kasih dari orang lain, generasi yang tidak mandiri, generasi yang menjadi beban orang lain, dan dilihat dari kacamata Sumber Daya Manusia tergolong sebagai generasi dengan kualitas yang sangat rendah bahkan dilihat dari strata social mereka tergolong sebagai kelompok yang paling rendah jika tidak dikatakan terhina. Akibatnya, mereka tidak dapat mengembangkan dirinya, mereka hidup terlunta – lunta, berjalan dengan tidak arah dan tujuan yang jelas dan dilihat dari harkat kemanusiaan maka ia tergolong sebagai manusia yang tidak terhormat dan tidak istimewa lagi. Jika dilihat sebaran berdasarkan kabupaten/Kota jumlah pengemis dan gelandangan terlihat dalam table berikut.

Tabel 2. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di NTB Tahun 2009 - 2011 Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun								
		Pengemis		Gelandangan		Jumlah		2010 – 2011		
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	Pengemis	Gelandangan	Jumlah
1	Lombok Barat	17	11	3	3	20	14	11	3	14
2	Lombok Tengah	120	115	35	43	155	158	115	43	158
3	Lombok Timur	54	54	15	15	69	69	54	15	69
4	Lombok Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mataram	35	187	96	0	131	187	0	962	962
6	Sumbawa Barat	29	0	24	0	53	0	0	0	0
7	Sumbawa	13	13	27	100	40	113	13	100	113
8	Dompu	99	94	406	398	505	492	24	60	84
9	Bima	0	47	0	61	0	108	68	40	108
10	Kota Bima	61	37	27	31	88	68	54	52	106
	<b>Jumlah</b>	<b>429</b>	<b>558</b>	<b>633</b>	<b>651</b>	<b>1.061</b>	<b>1.209</b>	<b>339</b>	<b>1.275</b>	<b>1.614</b>

Sumber : BPS, NTB dalam Angka 2011 – 2012. \*)Data tahun 2010 dan 2011 sama

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa pada tahun 2008 Gelandangan berjumlah 633 orang mengalami peningkatan menjadi 1.275 orang pada tahun 2011 sementara pengemis mengalami penurunan dari 429 orang pada tahun 2008 menjadi 339 orang pada tahun 2011. Dilihat dari sebaran kabupaten/Kota, terlihat perubahan yang luar biasa khususnya yang terjadi di Kota Mataram. Jika pada tahun 2008 pengemis berjumlah 35 orang dan pada tahun 2011 tidak ditemukan satu pengemis pun, namun gelandangan pada tahun 2011 berjumlah 962 orang yang semula berjumlah 187 orang pada tahun 2008. Fenomena ini menjadi permasalahan tersendiri bagi kota Mataram yang menjadi barometer perkembangan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikaitkan dengan fungsi ganda yang diperankan oleh kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tentunya memiliki sarana dan infrastruktur yang lebih lengkap dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya, sehingga menarik masyarakat untuk mengadu nasibnya di kota ini meskipun dengan menjadi gelandangan atau mengemis sekalipun. Dampaknya adalah beban yang ditanggung kota Mataram semakin dan semakin membuka lebar permasalahan social ekonomi. Kebijakan strategis yang dilakukan oleh Kota Mataram berkaitan dengan masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), telah dikeluarkan Perda No. 5 Tahun 2013.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengurangi gelandangan dan kemiskinan, pada setiap tempat – tempat strategis telah dipasang spanduk yang berisi himbuan kepada masyarakat umum untuk tidak memanjakan dan memberi kepada Gelandangan dan Pengemis dalam bentuk apapun, karena cara demikian akan menambah jumlah Gelandangan dan Pengemis dan membiarkan mereka menjadi orang yang malas dan tidak mandiri. Cara ini dilakukan untuk meminimisasi dan menghapus kebiasaan masyarakat terutama anak-anak yang masih memiliki masa depan yang cerah dari kebiasaan meminta-minta termasuk bagi masyarakat lainnya dengan membawa nama yayasan atau rumah-rumah ibadah. Di Kabupaten Bima dan Kota Bima jumlah pengemis mengalami peningkatan sementara jumlah gelandangan mengalami peningkatan, dan prestasi yang luar biasa dicapai oleh Kabupaten Dompu, jumlah gelandangan maupun pengemis mengalami penurunan yang luar biasa dimana pada tahun 2009 jumlah gelandangan dan pengemis mencapai 492 orang dan pada tahun 2011 tinggal 84 orang, sedangkan kabupaten lainnya tidak mengalami perubahan jumlah gelandangan maupun pengemis. Secara total jumlah gelandangan dan pengemis di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari 1.209 orang pada tahun 2009, menjadi 1.614 orang pada tahun 2011.

Mencermati tampilan data di atas, masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) masih menjadi agenda nasional dan daerah untuk memecahkannya, karena dilihat dari aspek manapun kondisi ini akan terus berkembang bila tidak dicarikan akar permasalahannya. Menjadi gelandangan atau mengemis secara ekonomi mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, karena dengan melakukan pekerjaan itu mereka mendapatkan pendapatan yang banyak, sehingga pekerjaan ini dalam jangka panjang akan menjadi penyakit social. Pemanfaatan dari hasil pekerjaan sebagai gelandangan maupun mengemis berdasarkan pantauan sesaat memang tertuju pada pemenuhan kebutuhan baik ekonomi maupun social, namun tidak sedikit dari hasil

pekerjaan ini dimanfaatkan untuk hal-hal negative yang justru akan menciptakan permasalahan baru baik dalam lingkup mikro maupun makro. Seiring dengan perjalanan dan perputaran waktu, pekerjaan ini telah menghantarkan mereka untuk membuat keputusan yang pendek, karena tanpa mengorbankan tenaga yang besar, mereka mampu meraup pendapatan yang banyak, sehingga mengajak lagi saudara-saudara yang lainnya untuk mengikuti pekerjaan yang sama sehingga akan menyebabkan jumlahnya semakin bertambah. Timbullah sikap malas untuk berusaha dengan mengorbankan tenaga dan pikiran, timbullah sikap untuk menerima saja dan dampak negative lainnya.

Permasalahan gelandangan dan pengemis sangatlah tidak bijak bila semata – mata diarahkan kepada sifat dan sikap yang sumber dari pelaku sebagai faktor utama yang menimbulkannya. Namun kita harus bijak mengatakan bahwa permasalahan gepeng juga sebagai akibat dari proses pembangunan yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Kebijakan – kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, terkadang tidak bersentuhan langsung dengan upaya pengurangan kemiskinan sehingga menimbulkan gelandangan dan pengemis. Kue pembangunan nasional hanya dinikmati oleh sebahagian kecil orang yang memang kondisinya sudah mapan, sementara mayoritas rakyat yang masih kekurangan masih berlutut dengan kekurangannya. Oleh karenanya dengan melihat realita yang terjadi disekelilingnya, mereka terpengaruh untuk melakukan pekerjaan meminta- minta meskipun nyawa dan fisik menjadi taruhannya, dan dilihat dari aspek spiritual mereka tidak lagi menghiraukannya yang penting mendapat penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan.

Pemenuhan kebutuhan hidup dalam ekonomi Islam telah diatur sedemikian indah dan teratur dalam Al-Qur'an Maupun Al-Hadist karena ini memang menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh manusia. Hidup yang sejahtera dan bahagia mustahil tercapai tanpa ketercukupan secara financial, dan pengamalan ajaran agama yang benar. Sebagai makhluk social, dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, karena menurut *sunnatullah*, tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri tanpa kerja sama atau saling ketergantungan dengan manusia lain (Chalil, 2009). Dalam konteks inilah, ekonomi islam mengajarkan bahwa manusia yang satu haru berusaha dan berikhtiar untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa yang selanjutnya barang dan jasa tersebut dapat dipertukarkan dengan manusia yang lain yang menghasilkan barang dan jasa yang berbeda. Dari hasil barang dan jasa ini dihasilkan pendapatan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dan Allah sudah menggariskan bahwa tidak ada satu manusiapun yang memiliki rejeki yang sama, ada yang banyak dan ada yang sedikit. Dari manusia yang menghasilkan pendapatan yang banyak (kaya) dapat mendistribusikan sebagian hartanya untuk orang lain yang kurang mampu. Inilah yang menjadi prinsip utama ekonomi islam, yaitu terciptanya distribusi harta untuk mewujudkan keadilan. Kerangka keadilan memungkinkan setiap orang memiliki peluang, control dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut, islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu (Amalia, 2009). Prinsip distribusi harta atau kekayaan dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada satu golongan sementara golongan lain tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga mengakibatkan mereka melakukan pekerjaan meminta- minta yang sangat tidak ditolerir dalam Islam.

## Meminta – Minta dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai agama samawi yang terakhir, diturunkan untuk memperbaiki harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia dan istimewa agar memiliki derajat yang berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Melalui kitab suci Al-Qur'an dan hadist –hadist Rasulullah SAW telah menjadikan serta menempatkan manusia sebagai subyek sekaligus obyek dalam aktivitas kehidupan di dunia. Manusia memiliki unsur yang sempurna dan lengkap dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik (QS. At-tin ayat 4) di antaranya diberikan kelebihan AKAL yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia kecuali Malaikat, itupun bersifat statis, artinya akal malaikat hanya dipergunakan untuk mengabdikan/menyembah Allah SWT, sementara akal manusia bersifat dinamis. Oleh karenanya, manusia diwajibkan untuk menjelajah bumi dan isinya dengan melakukan aktivitas atau bekerja. Upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia melalui bekerja merupakan sunatullah, sekaligus sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah yang bertugas sebagai pemimpin (*khalifah*). Wujud dari kepemimpinan manusia adalah memanfaatkan seluruh yang tersedia di bumi dan isinya untuk mencapai kesejahteraan hakiki di dunia dan di akhirat. Namun Allah SWT memberikan rambu – rambu bahwa jalan dan cara untuk mencapai kesejahteraan hakiki tersebut, manusia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, memusatkan pemenuhan jangka pendek dengan menguras habis seluruh potensi dan isi bumi tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kelestarian untuk generasi yang akan datang (QS. Al-Qashash, 77). Pada aya-ayat lain Allah juga menyuruh manusia untuk mengarungi

derasnya air sungai dan dahsyatnya ombak lautan, luasnya daratan dengan jalan yang berliku-liku penuh dengan semak-semak belukar, tingginya lembah dan gunung serta lebatnya hutan belantara untuk dijadikan sumber pendapatan atau hak milik sekalipun walaupun kepemilikan ini bukan kepemilikan mutlak, yang semuanya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada konteks lain, Allah juga mengisyaratkan bahwa untuk menggapai segala fasilitas yang disediakan secara gratis tersebut, manusia harus memikirkan dan memecahkan berbagai problema kehidupan yang dihadapi, karena tidak semua fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara langsung melainkan harus diolah lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa ayat yang dikutip di atas, maka tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mewujudkan kebutuhannya harus melakukan ikhtiar atau berusaha melalui bekerja. Allah dan RasulNYA atau Islam secara tegas tidak memberikan tempat kepada manusia untuk duduk berpangku tangan (menganggur) atau sekedar menunggu rejeki yang datang dari arah mana saja tanpa melakukan usaha atau bekerja. Manusia diciptakan secara sempurna dan susunan tubuh yang seimbang (Qs. Al-Infitar, 7), sehingga dengan keseimbangan tubuh ini manusia dapat bergerak secara dinamis dan hasil pergerakan ini akan memperlancar peredaran darah dan melemaskan otot dan saraf yang pada akhirnya akan menyebabkan manusia selalu berada dalam kondisi sehat sampai priode waktu tertentu (usia tertentu). Dalam konteks ekonomi, manusia yang memiliki pekerjaan tetap pada bidang profesi tertentu akan memperoleh pendapatan pula dan dari pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik berupa materi yang tahan lama (harta) maupun pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak tahan lama (kebutuhan sehari-hari). Dengan kondisi kesehatan yang stabil, maka produktivitas kerja manusia dapat meningkat yang tentunya akan mencapai hasil yang maksimal pula.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa meminta-minta itu akan menjatuhkan wibawa harkat kemanusiaannya. Manusia dengan dilandasi akal pikiran harus mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk berkarya, menghasilkan barang baru meskipun hasil dari usaha tersebut belum tentu untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia harus yakin bahwa besar kecilnya rejeki yang diperoleh merupakan ketentuan Allah SWT, dan disitulah letaknya keadilan Allah, jika semuanya kaya siapa yang mau bekerja dan jika semuanya miskin lantas pada lapangan kerja mana atau berapa produktivitas dan kemampuan untuk menghasilkan yang memberikan kehidupan yang layak. Uraian di atas telah menunjukkan beberapa ayat yang mengharuskan manusia berusaha agar menghindarkan diri dari rasa pasrah, mengharapkan belas kasihan orang lain ataupun melakukan pekerjaan yang terhina yaitu mengemis maupun menjadi gelandangan. Rasulullah SAW melalui beberapa hadistnya telah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang bahaya yang menimpa orang yang meminta- minta atau pengemis.

Beberapa hadist berikut dapat disimak yang artinya :

1. Seseorang yang masih saja meminta – minta kepada orang lain sampai datangnya hari kiamat, maka di mukanya tidak secuil dagingpun.(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).
2. Bila seseorang meminta – minta harta kepada seseorang untuk mengumpulkannya, sesungguhnya ia mengemis bara. Sebaik-bainya ia mengumpulkan harta sendiri (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
3. Jika seseorang hamba membuka pintu untuk mengemis, maka Allah akan membuka pintu kemiskinan baginya (HR. Abu Hurairah).
4. Sikiranya mereka mengetahui dampak dari tindakan meminta-minta, tentu tidak ada seorangpun yang mau meminta-minta sesuatu kepada orang lain.
5. Perbuatan meminta-minta adalah goresan yang membuat cacat muka seseorang. Ia boleh saja membiarkan goresan itu di mukanya, atau dapat pula menghilangkannya. Lain halnya bila orang itu meminta sesuatu kepada penguasa, atau jika ia menghadapi persoalan yang harus dilakukannya (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi).
6. Mengemis tidak dibenarkan selain kepada 3 golongan orang yaitu orang yang miskin, orang yang terikat utang besar dan orang yang dibebani uang tebusan besar (HR. para pemilik sunnah yang empat dan diperbaiki oleh Tirmidzi).

Beberapa hadist di atas menjadi landasan utama bagi umat manusia untuk mau mengembangkan dirinya , tidak mengandalkan pada bantuan orang lain terlebih dengan meminta-minta yang menyebabkan nilai dasar kemanusiaan yang terhormat ini menjadi rendah dan terhina.



## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2008 – 2011 mengalami penurunan, namun ada beberapa jenis yang mengalami peningkatan dari tahun 2008 – 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat masih membutuhkan kerja keras dengan berbagai kebijakan untuk menuju tercapai kesejahteraan social.
2. Jumlah Gelandangan dan Kemiskinan (Gepeng) juga mengalami fluktuasi namun masalah ini menjadi krusial dan penting karena mengganggu ketertiban dan manusia yang melakukan hal tersebut sesungguhnya merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
3. Gelandangan dan Kemiskinan terjadi karena adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan, yang masih mementingkan kepentingan individu dan menipisnya solidaritas social.
4. Meminta-minta (Gelandangan dan Pengemis) dalam ekonomi Islam sangat dikecam, bahkan mencoreng mukanya terkecuali bagi 3 golongan yaitu orang miskin, orang yang berutang besar dan orang yang dibebani dengan tebusan besar.

### Saran-Saran

1. Diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dilaukan oleh pemerintah seperti pemberdayaan dan pembinaan lanjutan sehingga dapat menghantarkan penyandang permasalahan kesejahteraan social dapat merubah statusnya menjadi lebih baik.
2. Gelandangan dan Pengemis tidak hanya dapat dituntaskan secara teoritis dan himbauan, melainkan pendekatan intensif terutama berkaitan dengan masalah spiritual yang bersumber dari internal keluarga sehingga bermuara pada lingkungan social.
3. Ekonomi Islam menganjurkan untuk lebih intensif menggali dana-dana social yang bersumber dari ajaran Islam baik wajib maupun sunnah sehingga distribusi harta dan kekayaan dapat berjalan sekaligus menciptakan pekerjaan baru sebagai sumber pendapatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Al-Hadist
- Amalia, Euis, 2009, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Peran Penguatan LKM dan UKM di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik NTB, 2009 – 2012, Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, Kerjasama BPS NTB dengan BAPPEDA NTB, Mataram.
- Chalil, Zaki Fuad, 2009, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam, Srti Khazanah Ekonomi Syariah, Erlangga, Jakarta.
- Chapra, M. Umer, 2010, Peradaban Muslim, Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, AMZAH, Jakarta.
- Chaudry, Muhammad Syarif, 2012, Sistem Ekonomi Islam, Sebuah Penganta, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2011, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Miftahul, 2009, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kaelany HD, 2005, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1995, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Gema Insani Press, Jakarta.
- Usman, Sunyoto, 2012, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.